



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1472 TAHUN 2021

TENTANG

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri menetapkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Nasional;
- b. bahwa unit kerja yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan unit kerja sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di unit kerja tersebut untuk terus melanjutkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi sehingga unit kerja dapat menjadi unit kerja percontohan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal¹⁷ Desember 2021

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR : 1472 TAHUN 2021

**TENTANG : UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) TAHUN 2021**

**NAMA-NAMA UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2021**

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)**

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Mahkamah Agung
2	Pengadilan Agama Cilacap	Mahkamah Agung
3	Pengadilan Agama Kabanjahe	Mahkamah Agung
4	Pengadilan Agama Kandangan	Mahkamah Agung
5	Pengadilan Agama Karang Asem	Mahkamah Agung
6	Pengadilan Agama Kebumen	Mahkamah Agung
7	Pengadilan Agama Kendal	Mahkamah Agung
8	Pengadilan Agama Maros	Mahkamah Agung
9	Pengadilan Agama Muara Bungo	Mahkamah Agung
10	Pengadilan Agama Muna-Raha	Mahkamah Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
11	Pengadilan Agama Ngawi	Mahkamah Agung
12	Pengadilan Agama Purwodadi	Mahkamah Agung
13	Pengadilan Agama Sampit	Mahkamah Agung
14	Pengadilan Agama Sarolangun	Mahkamah Agung
15	Pengadilan Agama Selat Panjang	Mahkamah Agung
16	Pengadilan Agama Serang	Mahkamah Agung
17	Pengadilan Agama Situbondo	Mahkamah Agung
18	Pengadilan Agama Sumber	Mahkamah Agung
19	Pengadilan Agama Tabanan	Mahkamah Agung
20	Pengadilan Agama Toli-Toli	Mahkamah Agung
21	Pengadilan Agama Tual	Mahkamah Agung
22	Pengadilan Agama Yogyakarta	Mahkamah Agung
23	Pengadilan Militer III-18 Ambon	Mahkamah Agung
24	Pengadilan Negeri Sintang	Mahkamah Agung
25	Pengadilan Negeri Amuntai	Mahkamah Agung
26	Pengadilan Negeri Bantaeng	Mahkamah Agung
27	Pengadilan Negeri Bantul	Mahkamah Agung
28	Pengadilan Negeri Kalianda	Mahkamah Agung
29	Pengadilan Negeri Karanganyar	Mahkamah Agung
30	Pengadilan Negeri Klaten	Mahkamah Agung
31	Pengadilan Negeri Kotabaru	Mahkamah Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
32	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Mahkamah Agung
33	Pengadilan Negeri Raha	Mahkamah Agung
34	Pengadilan Negeri Rote Ndao	Mahkamah Agung
35	Pengadilan Negeri Sukadana	Mahkamah Agung
36	Pengadilan Negeri Tanjung	Mahkamah Agung
37	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Mahkamah Agung
38	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	Mahkamah Agung
39	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Mahkamah Agung
40	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Mahkamah Agung
41	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Mahkamah Agung
42	Pengadilan Tinggi Agama Padang	Mahkamah Agung
43	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Mahkamah Agung
44	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
45	Bapas Kelas I Malang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
46	Bapas Kelas I Palembang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
47	Bapas Kelas I Surabaya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
48	Bapas Kelas II Balikpapan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
49	Bapas Kelas II Gorontalo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
50	Bapas Kelas II Karangasem	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
51	Bapas Kelas II Kendari	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
52	Bapas Kelas II Magelang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
53	Bapas Kelas II Pangkalan Bun	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
54	Bapas Kelas II Pati	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
55	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
56	Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
57	Kanim Kelas I Non TPI Palangkaraya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
58	Kanim Kelas I Non TPI Serang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
59	Kanim Kelas I TPI Balikpapan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
60	Kanim Kelas I TPI Jakarta Timur	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
61	Kanim Kelas I TPI Palembang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
62	Kanim Kelas I TPI Palu	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
63	Kanim Kelas I TPI Pekanbaru	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
64	Kanim Kelas II Non TPI Depok	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
65	Kanim Kelas II Non TPI Kotamobagu	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
66	Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
67	Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
68	Kanim Kelas II TPI Biak	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
69	Kanim Kelas II TPI Dumai	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
70	Kanim Kelas II TPI Tembilahan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
71	Kantor Wilayah Bali	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
72	Kantor Wilayah Bangka Belitung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
73	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
74	Kantor Wilayah Sumatera Barat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
75	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
76	Lapas Kelas I Palembang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
77	Lapas Kelas I Surabaya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
78	Lapas Kelas II A Bogor	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
79	Lapas Kelas II A Kalianda	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
80	Lapas Kelas II A Kotabumi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
81	Lapas Kelas II A Mataram	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
82	Lapas Kelas II B Mojokerto	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
83	Lapas Kelas II B Pasuruan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
84	Lapas Kelas II B Sleman	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
85	Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
86	Lapas Perempuan Kelas II B Kupang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
87	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
88	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
89	Rupbasan Kelas I Cirebon	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
90	Rupbasan Kelas I Surabaya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
91	Rupbasan Kelas II Probolinggo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
92	Rutan Perempuan Kelas II A Medan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
93	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kejaksaan Agung
94	Kejaksaan Negeri Balangan	Kejaksaan Agung
95	Kejaksaan Negeri Batu	Kejaksaan Agung
96	Kejaksaan Negeri Binjai	Kejaksaan Agung
97	Kejaksaan Negeri Jembrana	Kejaksaan Agung
98	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	Kejaksaan Agung
99	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	Kejaksaan Agung
100	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Kejaksaan Agung
101	Kejaksaan Negeri Kotabaru	Kejaksaan Agung
102	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	Kejaksaan Agung
103	Kejaksaan Negeri Merangin	Kejaksaan Agung
104	Kejaksaan Negeri Ngada	Kejaksaan Agung
105	Kejaksaan Negeri Nganjuk	Kejaksaan Agung
106	Kejaksaan Negeri Nunukan	Kejaksaan Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
107	Kejaksaan Negeri Pati	Kejaksaan Agung
108	Kejaksaan Negeri Tana Toraja	Kejaksaan Agung
109	Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara	Kejaksaan Agung
110	Kejaksaan Tinggi Riau	Kejaksaan Agung
111	SRENA POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
112	Bidang Hukum Polda Jawa Timur	Kepolisian Republik Indonesia
113	Biro SDM Polda Kalimantan Tengah	Kepolisian Republik Indonesia
114	Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Selatan	Kepolisian Republik Indonesia
115	Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali	Kepolisian Republik Indonesia
116	Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau	Kepolisian Republik Indonesia
117	Direktorat Intelijen Keamanan Polda NTB	Kepolisian Republik Indonesia
118	Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan	Kepolisian Republik Indonesia
119	Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur	Kepolisian Republik Indonesia
120	Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah	Kepolisian Republik Indonesia
121	Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau	Kepolisian Republik Indonesia
122	Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB	Kepolisian Republik Indonesia
123	Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan	Kepolisian Republik Indonesia
124	Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Utara	Kepolisian Republik Indonesia
125	Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Republik Indonesia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
126	Kepolisian Resor Agam	Kepolisian Republik Indonesia
127	Kepolisian Resor Balangan	Kepolisian Republik Indonesia
128	Kepolisian Resor Bantul	Kepolisian Republik Indonesia
129	Kepolisian Resor Belitung Timur	Kepolisian Republik Indonesia
130	Kepolisian Resor Cilegon	Kepolisian Republik Indonesia
131	Kepolisian Resor Labuhan Batu	Kepolisian Republik Indonesia
132	Kepolisian Resor Lubuk Linggau	Kepolisian Republik Indonesia
133	Kepolisian Resor Merangin	Kepolisian Republik Indonesia
134	Kepolisian Resor Pasuruan Kota	Kepolisian Republik Indonesia
135	Kepolisian Resor Pati	Kepolisian Republik Indonesia
136	Kepolisian Resor Pulang Pisau	Kepolisian Republik Indonesia
137	Kepolisian Resor Pulau Buru	Kepolisian Republik Indonesia
138	Kepolisian Resor Purbalingga	Kepolisian Republik Indonesia
139	Kepolisian Resor Seruyan	Kepolisian Republik Indonesia
140	Kepolisian Resor Sumbawa Barat	Kepolisian Republik Indonesia
141	Pelayanan Markas Polda DIY	Kepolisian Republik Indonesia
142	Pusat keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Republik Indonesia
143	RS Bhayangkara Mohamad Hasan Palembang	Kepolisian Republik Indonesia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
144	Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya	Kepolisian Republik Indonesia
145	Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara Polda DIY	Kepolisian Republik Indonesia
146	Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Republik Indonesia
147	Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara	Badan Pemeriksa Keuangan
148	Auditorat Utama Keuangan Negara III	Badan Pemeriksa Keuangan
149	Auditorat Utama Keuangan Negara IV	Badan Pemeriksa Keuangan
150	BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Badan Pemeriksa Keuangan
151	BPK RI Perwakilan Provinsi Bali	Badan Pemeriksa Keuangan
152	BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo	Badan Pemeriksa Keuangan
153	BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	Badan Pemeriksa Keuangan
154	BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Badan Pemeriksa Keuangan
155	Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI	Mahkamah Konstitusi
156	Biro Persidangan II	Sekretariat Jenderal DPR RI
157	Pusat Kajian Anggaran	Sekretariat Jenderal DPR RI
158	Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga	Kementerian Agama
159	MAN Insan Cendekia Serpong	Kementerian Agama
160	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	Kementerian ATR/BPN
161	Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan	Kementerian ATR/BPN
162	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur	Kementerian ATR/BPN

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
163	Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kementerian ATR/BPN
164	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	Kementerian ATR/BPN
165	Kantor Pertanahan Kota Bogor	Kementerian ATR/BPN
166	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Kementerian ATR/BPN
167	Kantor Pertanahan Kota Magelang	Kementerian ATR/BPN
168	Kantor Pertanahan Kota Medan	Kementerian ATR/BPN
169	Kantor Pertanahan Kota Tangerang	Kementerian ATR/BPN
170	Direktorat Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri
171	Biro Administrasi Keprajaan Dan Alumni IPDN	Kementerian Dalam Negeri
172	Direktorat Panas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
173	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
174	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
175	Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Jakarta II	Kementerian Kelautan dan Perikanan
176	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	Kementerian Kelautan dan Perikanan
177	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
178	Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kementerian Keuangan
179	Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan
180	Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Kementerian Keuangan
181	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
182	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
183	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
184	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
185	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
186	Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
187	Direktorat Intelijen Perpajakan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
188	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
189	Direktorat Kepabeanaan Internasional dan Antar Lembaga	Kementerian Keuangan
190	Direktorat Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
191	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
192	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	Kementerian Keuangan
193	Direktorat Pengelolaan Kas Negara	Kementerian Keuangan
194	Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
195	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
196	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
197	Direktorat Teknis Kepabeanaan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
198	Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
199	Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
200	Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
201	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi	Kementerian Keuangan
202	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	Kementerian Keuangan
203	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Kementerian Keuangan
204	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur	Kementerian Keuangan
205	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	Kementerian Keuangan
206	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur	Kementerian Keuangan
207	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi	Kementerian Keuangan
208	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang	Kementerian Keuangan
209	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	Kementerian Keuangan
210	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai	Kementerian Keuangan
211	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi	Kementerian Keuangan
212	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak	Kementerian Keuangan
213	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	Kementerian Keuangan
214	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
215	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Fakfak	Kementerian Keuangan
216	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember	Kementerian Keuangan
217	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang	Kementerian Keuangan
218	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung	Kementerian Keuangan
219	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa	Kementerian Keuangan
220	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk	Kementerian Keuangan
221	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili	Kementerian Keuangan
222	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado	Kementerian Keuangan
223	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manokwari	Kementerian Keuangan
224	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram	Kementerian Keuangan
225	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau	Kementerian Keuangan
226	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare	Kementerian Keuangan
227	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga	Kementerian Keuangan
228	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
229	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	Kementerian Keuangan
230	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang	Kementerian Keuangan
231	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	Kementerian Keuangan
232	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten	Kementerian Keuangan
233	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	Kementerian Keuangan
234	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat	Kementerian Keuangan
235	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	Kementerian Keuangan
236	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	Kementerian Keuangan
237	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	Kementerian Keuangan
238	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	Kementerian Keuangan
239	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	Kementerian Keuangan
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	Kementerian Keuangan
241	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin	Kementerian Keuangan
242	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam	Kementerian Keuangan
243	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
244	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi	Kementerian Keuangan
245	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura	Kementerian Keuangan
246	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang	Kementerian Keuangan
247	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado	Kementerian Keuangan
248	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram	Kementerian Keuangan
249	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidempuan	Kementerian Keuangan
250	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu	Kementerian Keuangan
251	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo	Kementerian Keuangan
252	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali	Kementerian Keuangan
253	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung	Kementerian Keuangan
254	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta	Kementerian Keuangan
255	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Kementerian Keuangan
256	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian Keuangan
257	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur	Kementerian Keuangan
258	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kementerian Keuangan
259	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Keuangan
261	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	Kementerian Keuangan
262	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan	Kementerian Keuangan
263	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi	Kementerian Keuangan
264	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan	Kementerian Keuangan
265	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah	Kementerian Keuangan
266	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Ambon	Kementerian Keuangan
267	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bantaeng	Kementerian Keuangan
268	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Blitar	Kementerian Keuangan
269	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bondowoso	Kementerian Keuangan
270	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember	Kementerian Keuangan
271	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kendari	Kementerian Keuangan
272	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kudus	Kementerian Keuangan
273	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pamekasan	Kementerian Keuangan
274	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pare-Pare	Kementerian Keuangan
275	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pati	Kementerian Keuangan
276	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Purwokerto	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
277	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sidoarjo	Kementerian Keuangan
278	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sorong	Kementerian Keuangan
279	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Surabaya I	Kementerian Keuangan
280	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Surabaya II	Kementerian Keuangan
281	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tangerang	Kementerian Keuangan
282	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bima	Kementerian Keuangan
283	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Gunung Sitoli	Kementerian Keuangan
284	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotabaru	Kementerian Keuangan
285	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Majene	Kementerian Keuangan
286	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Nabire	Kementerian Keuangan
287	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purworejo	Kementerian Keuangan
288	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Serui	Kementerian Keuangan
289	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sragen	Kementerian Keuangan
290	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor	Kementerian Keuangan
291	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga	Kementerian Keuangan
292	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua	Kementerian Keuangan
293	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying	Kementerian Keuangan
294	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
295	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan	Kementerian Keuangan
296	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	Kementerian Keuangan
297	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua	Kementerian Keuangan
298	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup	Kementerian Keuangan
299	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat	Kementerian Keuangan
300	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura	Kementerian Keuangan
301	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen	Kementerian Keuangan
302	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang	Kementerian Keuangan
303	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	Kementerian Keuangan
304	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk	Kementerian Keuangan
305	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	Kementerian Keuangan
306	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke	Kementerian Keuangan
307	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto	Kementerian Keuangan
308	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh	Kementerian Keuangan
309	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya	Kementerian Keuangan
310	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat	Kementerian Keuangan
311	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat	Kementerian Keuangan
312	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
313	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna	Kementerian Keuangan
314	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang	Kementerian Keuangan
315	Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
316	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok	Kementerian Keuangan
317	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	Kementerian Keuangan
318	Direktorat Pos	Kementerian Komunikasi dan Informatika
319	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika
320	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
321	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
322	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
323	Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
324	Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok	Kementerian Luar Negeri
325	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt	Kementerian Luar Negeri
326	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City	Kementerian Luar Negeri
327	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
328	Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
329	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
330	Biro Sumber Daya Manusia	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
331	Balai Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
332	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
333	BPPAUD Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
334	BPPAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
335	Galeri Nasional Indonesia	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
336	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
337	LPMP Provinsi Banten	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
338	LPMP Provinsi Jambi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
339	Politeknik Manufaktur Bandung	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
340	Politeknik Negeri Batam	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
341	Universitas Brawijaya (Fakultas Teknologi Pertanian)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
342	Universitas Diponegoro (Fakultas Teknik)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
343	Universitas Gadjah Mada (Fakultas Teknik)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
344	Universitas Indonesia (Fakultas Kesehatan Masyarakat)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
345	Universitas Padjadjaran (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
346	Direktorat Perundingan Multilateral	Kementerian Perdagangan
347	Balai Sertifikasi	Kementerian Perdagangan
348	Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II	Kementerian Perdagangan
349	Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III	Kementerian Perdagangan
350	Indonesia Trade Promotion Center Milan	Kementerian Perdagangan
351	Indonesia Trade Promotion Center Osaka	Kementerian Perdagangan
352	Pusat Pendidikan Sumber Daya Kemetrolgian	Kementerian Perdagangan
353	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Kementerian Perhubungan
354	Balai Pengujian Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan
355	Distrik Navigasi Kelas I Belawan	Kementerian Perhubungan
356	Distrik Navigasi Kelas I Dumai	Kementerian Perhubungan
357	Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok	Kementerian Perhubungan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
358	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Tangerang	Kementerian Perhubungan
359	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	Kementerian Perhubungan
360	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado	Kementerian Perhubungan
361	Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak	Kementerian Perhubungan
362	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan
363	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Baranangsiang	Kementerian Perhubungan
364	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Jatijajar	Kementerian Perhubungan
365	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tirtonadi-BPTD Wil. X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Kementerian Perhubungan
366	Balai Besar Industri Agro Bogor	Kementerian Perindustrian
367	Balai Besar Logam dan Mesin Bandung	Kementerian Perindustrian
368	Balai Diklat Industri Yogyakarta	Kementerian Perindustrian
369	Balai Diklat Industri Jakarta	Kementerian Perindustrian
370	Balai Diklat Industri Denpasar	Kementerian Perindustrian
371	Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri Bandar Lampung	Kementerian Perindustrian
372	Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan
373	Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan
374	Pusdiklat Bahasa Badan Diklat Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
375	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur	Kementerian Pertanian
376	Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta	Kementerian Pertanian
377	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	Kementerian Pertanian
378	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro)	Kementerian Pertanian
379	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Mataram	Kementerian Pertanian
380	Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hublemmas	Kementerian Sekretariat Negara
381	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kementerian	Kementerian Sekretariat Negara
382	BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi	Kementerian Sosial
383	BRSAMPK Toddopuli di Makassar	Kementerian Sosial
384	DISJERAHAD	Tentara Nasional Indonesia
385	PUSSENARHANUD	Tentara Nasional Indonesia
386	PASPAMPRES	Tentara Nasional Indonesia
387	AAU	Tentara Nasional Indonesia
388	KORMAR	Tentara Nasional Indonesia
389	KOARMADA II	Tentara Nasional Indonesia
390	PUSDIKARMED PUSSENARMED	Tentara Nasional Indonesia
391	Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial
392	Deputi Bidang Intelijen Siber	Badan Intelijen Negara
393	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Badan Kepegawaian Negara
394	Kantor Regional X BKN Denpasar	Badan Kepegawaian Negara

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
395	Direktorat Pelaporan dan Statistik	Badan Kependudukan dan KB Nasional
396	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Badan Kependudukan dan KB Nasional
397	Stasiun Geofisika Kelas I Bandung	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
398	Stasiun Klimatologi Kelas II Jembrana	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
399	Stasiun Klimatologi Kelas II Malang	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
400	Stasiun Klimatologi Kelas II Tangerang Selatan	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
401	Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin Maros	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
402	Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
403	Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Emas Semarang	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
404	Balai Besar Rehabilitasi BNN	Badan Narkotika Nasional
405	BNNP D.I. Yogyakarta	Badan Narkotika Nasional
406	BNN Kabupaten Sidoarjo	Badan Narkotika Nasional
407	Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Badan Narkotika Nasional
408	Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Badan Narkotika Nasional
409	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
410	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
411	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Badan Pengawas Obat dan Makanan
412	BBPOM di Bandar Lampung	Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
413	BBPOM di Bandung	Badan Pengawas Obat dan Makanan
414	BBPOM di Banjarmasin	Badan Pengawas Obat dan Makanan
415	BBPOM di Mataram	Badan Pengawas Obat dan Makanan
416	BPOM di Manokwari	Badan Pengawas Obat dan Makanan
417	Inspektorat BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
418	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
419	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
420	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
421	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
422	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
423	BPS Provinsi Bali	Badan Pusat Statistik
424	BPS Provinsi Jawa Barat	Badan Pusat Statistik
425	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Badan Pusat Statistik
426	BPS Kabupaten Badung	Badan Pusat Statistik
427	BPS Kabupaten Bangli	Badan Pusat Statistik
428	BPS Kabupaten Kediri	Badan Pusat Statistik

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
429	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	Badan Pusat Statistik
430	BPS Kabupaten Mojokerto	Badan Pusat Statistik
431	BPS Kabupaten Pinrang	Badan Pusat Statistik
432	BPS Kabupaten Sidoarjo	Badan Pusat Statistik
433	BPS Kabupaten Simeulue	Badan Pusat Statistik
434	BPS Kabupaten Trenggalek	Badan Pusat Statistik
435	BPS Kabupaten Wonosobo	Badan Pusat Statistik
436	BPS Kota Blitar	Badan Pusat Statistik
437	BPS Kota Magelang	Badan Pusat Statistik
438	BPS Kota Sorong	Badan Pusat Statistik
439	BPS Kota Tegal	Badan Pusat Statistik
440	Museum Sandi Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara
441	Pusat Akreditasi Kearsipan	Arsip Nasional Republik Indonesia
442	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara
443	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
444	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
445	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
446	Badan Kepegawaian Daerah DIY	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
447	Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
448	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
449	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
450	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
451	SMK Negeri 57 Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
452	Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
453	Balai Latihan Koperasi Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
454	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
455	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan, Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
456	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
457	Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
458	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
459	Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin	Pemerintah Kabupaten Bangka
460	Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul	Pemerintah Kabupaten Bantul
461	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Pemerintah Kabupaten Banyumas
462	Puskesmas Sempu	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
463	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung	Pemerintah Kabupaten Belitung
464	UPTD Puskesmas Dayeuhluhur 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Pemerintah Kabupaten Cilacap

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
465	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
466	BLUD Puskesmas Cukir	Pemerintah Kabupaten Jombang
467	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung	Pemerintah Kabupaten Klungkung
468	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto	Pemerintah Kabupaten Lumajang
469	Kecamatan Poncol	Pemerintah Kabupaten Magetan
470	Kecamatan Puri	Pemerintah Kabupaten Mojokerto
471	UPTD Puskesmas Cigugur	Pemerintah Kabupaten Pangandaran
472	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
473	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	Pemerintah Kabupaten Purworejo
474	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	Pemerintah Kabupaten Sleman
475	Puskesmas Guluk - Guluk	Pemerintah Kabupaten Sumenep
476	Puskesmas Jenu	Pemerintah Kabupaten Tuban
477	RSUD dr. ISKAK	Pemerintah Kabupaten Tulungagung
478	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung
479	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung
480	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Mojokerto
481	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Pemerintah Kota Mojokerto
482	Puskesmas Gayamsari Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
483	Puskesmas Gunungpati Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang
484	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Pemerintah Kota Banjarbaru
485	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro	Pemerintah Kota Metro
486	Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Mahkamah Agung
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Mahkamah Agung
3	Pengadilan Tinggi Agama ambon	Mahkamah Agung
4	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Mahkamah Agung
5	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	Mahkamah Agung
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8	Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Muara Enim	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9	Kantor Wilayah Jawa Timur	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10	Lapas Kelas I Cirebon	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Rupbasan Kelas II Wates	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
13	Kejaksaan Negeri Maros	Kejaksaan Agung
14	Kejaksaan Tinggi Bali	Kejaksaan Agung
15	Kejaksaan Tinggi Jambi	Kejaksaan Agung
16	Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY	Kepolisian Republik Indonesia
17	Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri	Kepolisian Republik Indonesia
18	Kepolisian Resor Kotawaringin Barat	Kepolisian Republik Indonesia
19	Kepolisian Resor Banyuasin	Kepolisian Republik Indonesia
20	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur	Badan Pemeriksa Keuangan
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik	Kementerian ATR/BPN
22	Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	Kementerian ATR/BPN
23	Kantor Pertanahan Kota Bandung	Kementerian ATR/BPN
24	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua	Kementerian Keuangan
25	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan	Kementerian Keuangan
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar	Kementerian Keuangan
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta	Kementerian Keuangan
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik	Kementerian Keuangan
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu	Kementerian Keuangan
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang	Kementerian Keuangan
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong	Kementerian Keuangan
33	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara	Kementerian Keuangan
34	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II	Kementerian Keuangan
35	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI	Kementerian Keuangan
36	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang	Kementerian Keuangan
37	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar II	Kementerian Keuangan
38	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Benteng	Kementerian Keuangan
39	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ketapang	Kementerian Keuangan
40	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau	Kementerian Keuangan
41	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Marisa	Kementerian Keuangan
42	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	Kementerian Keuangan
43	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju	Kementerian Keuangan
44	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro	Kementerian Keuangan
45	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya	Kementerian Keuangan
46	Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam	Kementerian Keuangan
47	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu	Kementerian Keuangan
48	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	Kementerian Luar Negeri

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
49	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang	Kementerian Perhubungan
50	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III-Surabaya	Kementerian Perhubungan
51	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV-Bali	Kementerian Perhubungan
52	Balai Kesehatan Penerbangan	Kementerian Perhubungan
53	Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia	Kementerian Perindustrian
54	Balai Riset Standardisasi Industri Samarinda	Kementerian Perindustrian
55	Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta	Kementerian Perindustrian
56	Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak	Kementerian Perindustrian
57	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	Badan Kependudukan dan KB Nasional
58	Pusat Laboratorium Narkotika BNN	Badan Narkotika Nasional
59	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Badan Pengawas Obat dan Makanan
60	BBPOM di Surabaya	Badan Pengawas Obat dan Makanan
61	BBPOM di Padang	Badan Pengawas Obat dan Makanan
62	BBPOM di Yogyakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan
63	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	BPS Provinsi Jawa Timur	Badan Pusat Statistik

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
65	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
66	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
67	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
69	RSUD Kab. Sidoarjo	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
70	Kecamatan Sukodono	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung
72	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**



TJAHJO KUMOLO